

Evaluasi Hasil RKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Triwulan II Tahun 2023

**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
2023**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya dalam memberikan kekuatan sehingga dokumen Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023, kondisi Triwulan II ini dapat disusun dan diselesaikan sebagaimana yang diharapkan.

Evaluasi dan pengendalian hasil pelaksanaan RKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan untuk Triwulan II Tahun Anggaran 2023 ini merupakan salah satu dari penunjang urusan wajib dan pilihan yang terdiri dari urusan wajib 2 Program, 10 Kegiatan dan 31 Sub Kegiatan dan Urusan pilihan 1 Program, 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan. Evaluasi hasil RKPD ini merupakan kompilasi dari Evaluasi Hasil Rencana Kerja seluruh Program dan Kegiatan yang ada di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan daerah dan perangkat daerah serta menjadi bagian dari upaya untuk mewujudkan sinergi langkah-langkah kebijakan, program/kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan.

Selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian laporan ini. Semoga laporan ini



dapat bermanfaat bagi kita dalam menyusun strategi dan langkah-langkah pembangunan di daerah.

Semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kemudahan dalam setiap upaya kita untuk melaksanakan pembangunan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan.

Billahhi taufik wal hidayah

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Painan, 03 Juli 2023

Kepala Badan Pengembangan dan
Kepegawaian Sumber Daya Manusia
Kabupaten Pesisir Selatan



TAMSIR, S.H., M.M

NIP. 19670312 198803 1 003



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Metodologi	6
BAB II CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN DANA PROGRAM/KEGIATAN RKPD DAN KENDALA	7
BAB III KESIMPULAN	11
3.1 Kesimpulan Hasil Pelaksanaan Evaluasi RKPD BKPSDM Triwulan II Tahun 2023	11
LAMPIRAN Tabel Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan Periode Pelaksanaan Triwulan II Tahun Anggaran 2023.	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan dengan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada guna meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan yang berkualitas menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan baik dalam skala nasional maupun daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 dan dilaksanakan melalui APBD Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 05 Tahun 2022, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 dan

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, telah dibentuk tim penyusun Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023.

Tim yang dibentuk telah melakukan evaluasi yang meliputi realisasi pencapaian target kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Evaluasi RKPD yang dilakukan bertujuan untuk melihat perkembangan hasil pelaksanaan RKPD dan keselarasan antara APBD dengan RKPD serta memberikan panduan kepada Pemerintah Daerah dalam menyusun rancangan kebijakan.

Evaluasi RKPD Triwulan II Tahun Anggaran 2023 didasarkan kepada pencapaian kinerja pembangunan sampai dengan kondisi 30 Juni 2023, fenomena pembangunan yang ada, isu-isu strategis, serta pertimbangan sinergitas antar sektor pembangunan. Sebagai dokumen evaluasi perencanaan pembangunan tahunan selama tahun berjalan, diharapkan hasil evaluasi dapat menjadi acuan dalam penyusunan RKPD Tahun 2023.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

- i. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030.
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026,
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 05 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.
- m. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023.
- n. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2023 adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian target rencana program dan kegiatan prioritas daerah, sebagaimana tercantum dalam RKPD Tahun 2023, guna :

- a. Menjamin bahwa prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program/kegiatan prioritas daerah, indikator kinerja, dan pagu indikatif dalam RKPD telah dipedomani dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2023.
- b. Menilai daya serap capaian target kinerja program/kegiatan, mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD Tahun 2023 dan RPJMD Tahun 2021-2026.
- c. Memastikan perkembangan hasil pelaksanaan RKPD Tahun 2023 dan keselarasan antara RKPD dengan APBD Tahun 2023.
- d. Memperoleh gambaran capaian target kinerja dan pendanaan RKPD Tahun 2023.
- e. Mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan RKPD Tahun 2023, yang merupakan tahun ke-3 dari pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026.
- f. Merumuskan rekomendasi dan saran tindak lanjut untuk dipergunakan sebagai masukan dalam peningkatan kinerja pembangunan daerah.

1.4 Metodeologi

Metodologi yang digunakan dalam pelaksanaan penyusunan evaluasi RKPD ini yaitu dengan menghitung capaian kinerja program dan kegiatan dengan menggunakan kategori *interval* nilai realisasi kinerja program dan kegiatan sampai dengan triwulan berkenaan. Penggunaan kategori interval ini akan membantu pengklasifikasian penilaian realisasi kinerja program dan kegiatan berdasarkan target rencana program dan kegiatan prioritas daerah. Kategori interval yang digunakan adalah sebagai berikut :

**Kriteria Penilaian dan Interval Nilai Realisasi Kinerja
Evaluasi Hasil RKPD**

No.	Kriteria Penilaian	Simbol	Interval Nilai
1	Sangat Tinggi	ST	91% $\geq$ 100%
2	Tinggi	T	76% $\leq$ 90 %
3	Sedang	S	66% $\leq$ 75%
4	Rendah	R	51% $\leq$ 65%
5	Sangat Rendah	SR	$\leq$ 50%

BAB II

CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN DANA PROGRAM / KEGIATAN RKPD

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Memiliki 2 urusan yakni Wajib dan Pilihan, urusan wajib yaitu : Kepegawaian, urusan pilihan yaitu Pendidikan Dan Pelatihan.

URUSAN WAJIB

Urusan wajib terdiri atas 2 Program, 10 Kegiatan dan 31 Sub Kegiatan dengan anggaran Tahun 2023 sebesar Rp.6.337.914.209, - sampai dengan kondisi 30 Juni 2023 telah terealisasi sebesar Rp.2.924.610.504,- atau sebesar 46.14 % dengan interval nilai capaian kinerja RPJMD $76 \leq 90\%$ (Sedang). Program dan kegiatan urusan wajib yakni :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan:
 - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan:
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- 3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan:
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan:
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 5) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan Sub Kegiatan:
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 6) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
- Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD

2. Program Kepegawaian Daerah

- 1) Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN, dengan Sub Kegiatan Sbb:
- Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
 - Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
 - Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
 - Pengelolaan Data Kepegawaian
- 2) Kegiatan Mutasi dan Promosi, dengan Sub Kegiatan sbb:
- Pengelolaan Mutasi ASN
 - Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
 - Pengelolaan Promosi ASN
- 3) Pengembangan Kompetensi ASN
- Pembinaan Jabatan Fungsional ASN
 - Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN

4) Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

- Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
- Pembinaan Disiplin ASN

URUSAN PILIHAN

Urusan pilihan terdiri atas 1 Program, 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan anggaran Tahun 2023 sebesar Rp.91.361.825,-. sampai dengan kondisi 30 Juni 2023 telah terealisasi sebesar Rp.10.564.775,- atau sebesar 11.56% dengan nilai capaian kinerja RPJMD $\leq 50\%$ (Sangat Rendah). Program dan kegiatan urusan pilihan yakni :

1. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

1) Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional, dengan sub kegiatan sbb:

- Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan

BAB III KESIMPULAN

3.1. Kesimpulan Hasil Pelaksanaan Evaluasi RKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Triwulan II Tahun 2023

Rekapitulasi hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Triwulan II, Tahun 2023 dapat dilihat berdasarkan tabel di bawah ini.

Rekapitulasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Konkuren Triwulan I1 Tahun 2023.

No	Urusan	Anggaran APBD 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran s/d Kondisi 14 Juni 2023 (Rp)	Capaian Kinerja		Realisasi Anggaran	
				Persen- tase	Kategori	Persen- tase	Kategori
I. Urusan Wajib							
1	Kepegawaian	6.337.914.209,-	2.924.610.504,-	75.31	S	46.14	SR

No	Urusan	Anggaran APBD 2022 (Rp)	Realisasi Anggaran s/d Kondisi 30 Juni 2022 (Rp)	Capaian Kinerja		Realisasi Anggaran	
				Persentase	Kategori	Persen -tase	Kategori
II. Urusan Pilihan							
1	Pendidikan Dan Pelatihan	91.361.825,-	10.564.775,-	50	SR	11.56	SR

Dari tabel di atas terlihat bahwa pelaksanaan pencapaian kinerja dan hasil penyerapan anggaran sampai tanggal 30 Juni 2023 memiliki interval penilaian realisasi kinerjanya Sedang (S) yaitu 62.66 dengan realisasi 45.65%. Hasil pengendalian dan evaluasi memperlihatkan permasalahan yang perlu menjadi perhatian bersama yaitu, antara lain :

- Belum optimalnya perencanaan, monitoring dan evaluasi
- Pengadministrasian Keuangan sedang dalam proses pencairan
- Belum Optimalnya Rencana Analisis Kompetensi

Rekomendasi

Beberapa rekomendasi yang disarankan sebagai tindak lanjut dari Evaluasi Hasil RKPD Triwulan II, Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Badan/seluruh Kepala Bidang melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia secara rutin setiap triwulan, sehingga permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat cepat diketahui.
- b. Seluruh Kepala Bidang dan Sub Kepala Bidang agar meningkatkan perhatian terhadap data capaian kinerja setiap triwulan sebagai bahan analisis pengambilan kebijakan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan.
- c. Agar Kepala bidang lebih serius dalam menyusun, menganalisa dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan setiap triwulan.

Painan, 03 Juli 2023

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Pesisir Selatan



TAMSIR, S.H., M.M

NIP.19670312 198803 1 003

0000000000000000

[illegible]

[illegible]

2b		5	03	01	2	00	00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diperkirakan : 46 unit	N/A	N/A	42	18,234,500	46	17,950,000	9	4,500,000	9	3,050,000					18	7,550,000	16	7,550,000	39.13	42.06
3.c		5	03	01	2	00	00	Pemeliharaan/Perbaikan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperkirakan/Ditahabkan : 1 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperkirakan/Ditahabkan : 1 Unit	N/A	N/A	1	88,128,000	1	24,800,000	1		1	24,570,000					1	24,670,000	1	24,570,000	100.00	99.07
II		5	03	02				PROGRAM KEPENGAWAHAN DAERGAH		N/A	N/A		682,778,910	100	1,134,794,482		174,048,889		264,721,419						440,770,388		440,770,388	100.03	38.84
1		5	03	02	2	01		Pengadaan, Pemeliharaan dan Informasi Kepegawaian ASN		N/A	N/A		148,940,305		541,010,882		61,953,190		64,989,312						128,888,482		128,888,482	227.31	43.88
1.a		5	03	02	2	01	03	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPK : 200 Dokumen	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPK : 200 Dokumen	N/A	N/A	205	62,132,520	200	214,829,388		41,332,550	1266	38,486,496					1266	77,828,040	1266	77,828,040	633.00	36.23
2b		5	03	02	2	01	00	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan : 314 Dokumen	N/A	N/A	355	18,813,240	314	71,150,281	205	19,371,000	122	7,550,025					327	26,922,425	327	26,922,425	104.14	37.52
3.c		5	03	02	2	01	10	Pengadaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengadaan Sistem Informasi Kepegawaian : 6000 Dokumen	N/A	N/A	6000	56,485,345	6000	45,016,033	5975	1,255,000	1618	17,648,875					7493	18,891,875	7493	18,891,875	124.88	41.44
4.d		5	03	02	2	01	11	Pengadaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengadaan Data Kepegawaian : 250 Dokumen	N/A	N/A	301	10,295,100	250	8,820,380	114		4	5,216,116					119	5,216,116	119	5,216,116	47.20	59.14
2		5	03	02	2	02		Mutasi dan Promosi		N/A	N/A		329,244,750		445,549,483		55,885,699		127,072,898						182,837,899		182,837,899	109.07	44.48
1.a		5	03	02	2	02	01	Pengadaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi ASN : 1688 Dokumen	N/A	N/A	1688	161,353,920	200	97,472,220	230	16,597,100	204	30,728,898					443	47,328,898	443	47,328,898	221.50	48.55
2.b		5	03	02	2	02	02	Pengadaan Kemakan Pangkat ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi ASN : 1480 ASN	N/A	N/A	1123	118,803,340	1400	143,650,015	640	2,484,900		87,191,950					640	88,078,850	640	88,078,850	45.71	62.42
3.c		5	03	02	2	02	03	Pengadaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Promosi ASN : 5 Dokumen	N/A	N/A	173	117,280,480	5	204,020,348	2	38,783,000	1	9,151,180					3	45,934,780	3	45,934,780	60.00	22.47
3		5	03	02	2	03		Pengembangan Kompetensi ASN		N/A	N/A		65,545,153		84,161,983		11,348,000		17,898,180						29,238,160		29,238,160	50	34.48

LAPORAN BULANAN											
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN											
KEADAAN BULAN : JUNI 2023											
0	PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN	Jumlah Dana	Nama PPTK/KPA	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			SUMBER DANA	
					Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	s/d bl lalu	s/d bl ini	Target s/d bl YAD		
1	BKPSDM	3 6,429,276,034	4	5 2,935,175,279	6 2,935,175,279	7 45.65	8 40.50	9 50.04	10 59.87	11	
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	5,203,119,727									
A.	KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	56,169,120		22,952,650	22,952,650	40.86	41.67	50.00	58.83		
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah/ Belanja Operasi	34,437,760		12,287,650	12,287,650	35.68	41.67	50.00	58.83	DAU	
	a Belanja Barang dan Jasa	34,437,760	HENDRAWATI, SE	12,287,650	12,287,650	35.68	41.67	50.00	58.83		
	2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah/ Belanja Operasi	21,731,360		10,665,000	10,665,000	49.08	41.67	50.00	58.83	DAU	
	a Belanja Barang dan Jasa	21,731,360	HENDRAWATI, SE	10,665,000	10,665,000	49.08	41.67	50.00	58.83		
B.	KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4,416,063,035		2,116,422,871	2,116,422,871	47.93	41.67	50.07	58.91		
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN/ Belanja Operasi	4,336,276,035		2,079,658,056	2,079,658,056	47.96	41.67	50.00	58.83	DAU	
	a. Belanja Pegawai	4,336,276,035	HENDRAWATI, SE	2,079,658,056	2,079,658,056	47.96	41.67	50.00	58.83		
	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN/ Belanja Operasi	47,880,000		18,790,000	18,790,000	39.24	41.67	50.00	58.83	DAU	
	a. Belanja Pegawai	47,880,000	HENDRAWATI, SE	18,790,000	18,790,000	39.24	41.67	50.00	58.83		
	3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	31,907,000		17,974,815	17,974,815	56.34	41.67	60.00	70.00	DAU	
	Belanja Operasi	31,907,000									
	a Belanja Barang dan Jasa	31,907,000	HENDRAWATI, SE	17,974,815	17,974,815	56.34	41.67	60.00	70.00		
C.	KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	356,351,323		164,887,788	164,887,788	46.27	43.35	52.56	79.61		
	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	5,496,720		5,496,720	5,496,720	100.00	100.00	100.00	100.00	DAU	
	Belanja Operasi	5,496,720									
	a. Belanja Barang dan Jasa	5,496,720	HENDRAWATI, SE	5,496,720	5,496,720	100.00	100.00	100.00	100.00		
	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/ Belanja Operasi	74,541,850		-	0	0.00	5.00	5.00	100.00	DAU	
	a. Belanja Pegawai	0	HENDRAWATI, SE	-	0						
	b. Belanja Barang dan Jasa				0						
	Belanja Modal	74,541,850		0	0	0.00	5.00	5.00	100.00		

0	PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN	Jumlah Dana	Nama PPTK/KPA	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			SUMBER DANA
					Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	s/d bl lalu	s/d bl ini	Target s/d bl YAD	
	a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	74,541,850			0	0.00	5.00	5.00	100.00	
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14,165,492	HENDRAWATI, SE	6,774,002	6,774,002	47.82	50.00	50.00	50.00	DAU
	Belanja Operasi	14,165,492		6,774,002	6,774,002	47.82	50.00	50.00	50.00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	14,165,492		6,774,002	6,774,002	47.82	50.00	50.00	50.00	
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35,705,703	HENDRAWATI, SE	20,013,547	20,013,547	56.05	60.00	60.00	70.00	DAU
	Belanja Operasi	35,705,703		20,013,547	20,013,547	56.05	60.00	60.00	70.00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	35,705,703		20,013,547	20,013,547	56.05	60.00	60.00	70.00	
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31,555,558	HENDRAWATI, SE	13,248,423	13,248,423	41.98	41.67	50.00	58.83	DAU
	Belanja Operasi	31,555,558		13,248,423	13,248,423	41.98	41.67	50.00	58.83	
	a. Belanja Barang dan Jasa	31,555,558		13,248,423	13,248,423	41.98	41.67	50.00	58.83	
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang	5,400,000	HENDRAWATI, SE	2,800,000	2,800,000	51.85	41.67	52.00	58.83	DAU
	Belanja Operasi	5,400,000		2,800,000	2,800,000	51.85	41.67	52.00	58.83	
	a. Belanja Barang dan Jasa	5,400,000		2,800,000	2,800,000	51.85	41.67	52.00	58.83	
7	Fasilitas kunjungan tamu	8,316,000	HENDRAWATI, SE	2,987,600	2,987,600	35.93	41.67	50.00	58.83	DAU
	Belanja Operasi	8,316,000		2,987,600	2,987,600	35.93	41.67	50.00	58.83	
	a. Belanja Barang dan Jasa	8,316,000		2,987,600	2,987,600	35.93	41.67	50.00	58.83	
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	181,170,000	HENDRAWATI, SE	113,567,496	113,567,496	62.69	56.00	70.00	80.00	DAU
	SKPD									
	Belanja Operasi	181,170,000		113,567,496	113,567,496	62.69	56.00	70.00	80.00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	181,170,000		113,567,496	113,567,496	62.69	56.00	70.00	80.00	
D.	KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN	259,456,124		105,226,767	105,226,767	40.56	41.67	50.00	58.83	
	PEMERINTAH DAERAH									
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan	136,800,000	HENDRAWATI, SE	57,417,813	57,417,813	41.97	41.67	50.00	58.83	DAU
	Belanja Operasi	136,800,000		57,417,813	57,417,813	41.97	41.67	50.00	58.83	
	a. Belanja Barang dan Jasa	136,800,000		57,417,813	57,417,813	41.97	41.67	50.00	58.83	
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	122,656,124	HENDRAWATI, SE	47,808,954	47,808,954	38.98	41.67	50.00	58.83	DAU
	Belanja Operasi	122,656,124		47,808,954	47,808,954	38.98	41.67	50.00	58.83	
	a. Belanja Barang dan Jasa	122,656,124		47,808,954	47,808,954	38.98	41.67	50.00	58.83	
E.	KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH	110,168,125		71,155,120	71,155,120	64.59	38.11	66.51	73.65	
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH									
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36,400,000	HENDRAWATI, SE	24,017,820	24,017,820	65.98	60.00	70.00	80.00	DAU
	Belanja Operasi	36,400,000		24,017,820	24,017,820	65.98	60.00	70.00	80.00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	36,400,000		24,017,820	24,017,820	65.98	60.00	70.00	80.00	

0	PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN	Jumlah Dana	Nama PPTK/KPA	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)				SUMBER DANA
					Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	s/d bl lalu	s/d bl ini	Target s/d bl YAD		
	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	31,018,125	HENDRAWATI, SE	15,017,300	15,017,300	48.41	41.67	50.00	58.83	DAU	
	Belanja Operasi	31,018,125		15,017,300	15,017,300						
	a. Belanja Barang dan Jasa	31,018,125		15,017,300	15,017,300	48.41	41.67	50.00	58.83		
	3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17,950,000	HENDRAWATI, SE	7,550,000	7,550,000	42.06	33.33	41.67	50.00	DAU	
	Belanja Operasi	17,950,000		7,550,000	7,550,000	42.06	33.33	41.67	50.00		
	a. Belanja Barang dan Jasa	17,950,000		7,550,000	7,550,000	42.06	33.33	41.67	50.00		
	4 Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	24,800,000	HENDRAWATI, SE	24,570,000	24,570,000	99.07	5.00	100.00	100.00	DAU	
	Belanja Operasi	24,800,000		24,570,000	24,570,000	99.07	5.00	100.00	100.00		
	b. Belanja Barang dan Jasa	24,800,000		24,570,000	24,570,000	99.07	5.00	100.00	100.00		
F	KEGIATAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	4,912,000		3,195,000	3,195,000	65.04	30.00	70.00	80.00		
	1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4,912,000	HENDRAWATI, SE	3,195,000	3,195,000	65.04	30.00	70.00	80.00	DAU	
	Belanja Operasi	4,912,000		3,195,000	3,195,000	65.04	30.00	70.00	80.00		
	a. Belanja Barang dan Jasa	4,912,000		3,195,000	3,195,000	65.04	30.00	70.00	80.00		
II	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1,134,794,482		440,770,308	440,770,308	38.84	36.85	50.05	58.85		
A	Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian ASN	341,016,882		128,868,462	128,868,462	37.79	42.14	50.26	59.12		
	1 Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	214,829,388	AFRIANTO, SE, MM	77,828,046	77,828,046	36.23	41.67	50.00	58.83	DAU	
	Belanja Operasi	214,829,388		77,828,046	77,828,046	36.23	41.67	50.00	58.83		
	a. Belanja Barang dan Jasa	214,829,388		77,828,046	77,828,046	36.23	41.67	50.00	58.83		
	2 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	71,750,281	AFRIANTO, SE, MM	26,922,425	26,922,425	37.52	41.67	50.00	58.83	DAU	
	Belanja Operasi	71,750,281		26,922,425	26,922,425	37.52	41.67	50.00	58.83		
	a. Belanja Barang dan Jasa	71,750,281		26,922,425	26,922,425	37.52	41.67	50.00	58.83		
	3 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	45,616,833	AFRIANTO, SE, MM	18,901,875	18,901,875	41.44	41.67	50.00	58.83	DAU	
	Belanja Operasi	45,616,833		18,901,875	18,901,875	41.44	41.67	50.00	58.83		
	a. Belanja Pegawai	6,600,000		1,800,000	1,800,000	27.27	41.67	50.00	58.83		
	b. Belanja Barang dan Jasa	39,016,833		17,101,875	17,101,875	43.83	41.67	50.00	58.83		
	4 Pengelolaan Data Kepegawaian	8,820,380	AFRIANTO, SE, MM	5,216,116	5,216,116	59.14	60.00	60.00	70.00	DAU	
	Belanja Operasi	8,820,380		5,216,116	5,216,116	59.14	60.00	60.00	70.00		
	a. Belanja Barang dan Jasa	8,820,380		5,216,116	5,216,116	59.14	60.00	60.00	70.00		
B	Mutasi dan Promosi ASN	445,549,483		182,937,699	182,937,699	41.06	34.02	48.50	57.47		
	1 Pengelolaan Mutasi ASN	97,472,220	SYAFRINO, S.AP, M.I.Kom	47,326,069	47,326,069	48.55	41.67	50.00	58.83	DAU	
	Belanja Operasi	97,472,220		47,326,069	47,326,069	48.55	41.67	50.00	58.83		
	a. Belanja Barang dan Jasa	97,472,220		47,326,069	47,326,069	48.55	41.67	50.00	58.83		

0	PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN	Jumlah Dana	Nama PPTK/KPA	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			SUMBER DANA
					Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	s/d bl lalu	s/d bl ini	Target s/d bl YAD	
	2 Pengelaaan Kenaikan Pangkat ASN	143,656,915	SYAFRINO, S.AP, M.I.Kom	89,676,850	89,676,850	62.42	41.67	69.08	79.03	DAU
	Belanja Operasi	143,656,915		89,676,850	89,676,850	62.42	41.67	69.08	79.03	
	a Belanja Pegawai	6,600,000		2,400,000	2,400,000	36.36	41.67	50.00	58.83	
	b Belanja Barang dan Jasa	137,056,915		87,276,850	87,276,850	63.68	41.67	70.00	80.00	
	3 Pengelaaan Promosi ASN	204,420,348	SYAFRINO, S.AP, M.I.Kom	45,934,780	45,934,780	22.47	25.00	33.33	41.67	DAU
	Belanja Operasi	204,420,348		45,934,780	45,934,780	22.47	25.00	33.33	41.67	
	a Belanja Barang dan Jasa	204,420,348		45,934,780	45,934,780	22.47	25.00	33.33	41.67	
	C Pengembangan Kompetensi ASN	84,761,993		29,230,150	29,230,150	34.48	20.28	62.30	69.94	
	1 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	64,761,993	AFRIKAL, SH	29,230,150	29,230,150	45.13	25.00	80.00	90.00	DAU
	Belanja Operasi	64,761,993		29,230,150	29,230,150	45.13	25.00	80.00	90.00	
	a Belanja Barang dan Jasa	64,761,993		29,230,150	29,230,150	45.13	25.00	80.00	90.00	
	2 Pengelaaan Pendidikan Lanjutan ASN	20,000,000	AFRIKAL, SH	0	-	0.00	5.00	5.00	5.00	DAU
	Belanja Operasi	20,000,000		0	-	0.00	5.00	5.00	5.00	
	a Belanja Barang dan Jasa	20,000,000			-	0.00	5.00	5.00	5.00	
	D Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	263,466,124		99,733,997	99,733,997	37.85	40.13	48.46	57.25	
	1 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	24,310,000	AFRIKAL, SH	5,568,615	5,568,615	22.91	25.00	33.33	41.67	DAU
	Belanja Operasi	24,310,000		5,568,615	5,568,615	22.91	25.00	33.33	41.67	
	a Belanja Barang dan Jasa	24,310,000		5,568,615	5,568,615	22.91	25.00	33.33	41.67	
	2 Pembinaan Disiplin ASN	239,156,124	AFRIKAL, SH	94,165,382	94,165,382	39.37	41.67	50.00	58.83	DAU
	Belanja Operasi	239,156,124		94,165,382	94,165,382	39.37	41.67	50.00	58.83	
	a Belanja Barang dan Jasa	239,156,124		94,165,382	94,165,382	39.37	41.67	50.00	58.83	
	III PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	91,361,825		10,564,775	10,564,775	11.56	17.28	17.99	27.89	
	A Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	91,361,825		10,564,775	10,564,775	11.56	17.28	17.99	27.89	
	1 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	91,361,825	AFRIKAL, SH	10,564,775	10,564,775	11.56	17.28	17.99	27.89	DAU
	Belanja Operasi	91,361,825		10,564,775	10,564,775	11.56	17.28	17.99	27.89	
	a Belanja Pegawai	7,800,000		3,000,000	3,000,000	38.46	41.67	50.00	58.83	
	b Belanja Barang dan Jasa	83,561,825		7,564,775	7,564,775	9.05	15.00	15.00	25.00	

Poinan, 03 Juli 2023

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN PESISIR SELATAN

TAMSIR, S.H., M.M

NIP.19670312 198803 1 003

PESISIR SELATAN